

## SELAMA RAMADAN JAM PELAJARAN DIKURANGI Siswa Agar Memperbanyak Kegiatan Keagamaan

**YOGYA (KR)** - Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Bersama terkait kebijakan jam belajar dan kegiatan sekolah selama Bulan Ramadhan 1446 H/2025 M. Dalam suatu edaran tersebut disepakati bahwa durasi belajar dikurangi 10 menit per jam pelajaran. Apabila biasanya satu jam pelajaran berlangsung 45 menit, namun selama Ramadhan dipersingkat menjadi 35 menit. Adapun waktu yang dikurangi tersebut rencananya akan dimanfaatkan untuk pembinaan akhlak mulia, penguatan kepemimpinan, dan peningkatan ibadah, baik di sekolah maupun di rumah.

"Kalau dilihat dari surat edaran yang ada tahapan pembelajaran selama Ramadhan telah diatur secara rinci. Pada 27 Februari sampai 28 Februari dan 3 Maret sampai 5 Maret 2025, pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di rumah, tempat ibadah, atau lingkungan masyarakat sesuai penugasan sekolah. Kami harap kebijakan ini dapat mulai diterapkan sejak awal masuk sekolah di bulan Ramadhan," kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Suhirman di Yogyakarta, Senin (24/2).

Dalam surat edaran tersebut juga dijelaskan bahwa 6 Maret sampai 25 Maret 2025, siswa mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah atau madrasah, dilengkapi dengan aktivitas tambahan yang memperkaya aspek keagamaan dan penguatan

karakter. Suhirman mengatakan, selama Bulan Suci Ramadhan, siswa dianjurkan mengikuti kegiatan keagamaan sesuai keyakinan masing-masing. Untuk siswa muslim, ada tadarus Alquran, pesantren kilat, dan kajian keislaman. Siswa non-Muslim dapat mengikuti bimbingan rohani atau aktivitas keagamaan lain yang relevan.

Tidak hanya itu setelah pulang dari sekolah siswa diharapkan bisa melanjutkan ibadah di rumah. Misalnya dalam bentuk penguatan karakter seperti kegiatan sosial dan kepemimpinan. "Kami berharap orangtua juga proaktif melakukan pendampingan kepada anak dalam menjalankan ibadah serta memantau aktivitas belajar mandiri," ungkapnya.

Kepala Disdikpora DIY menambahkan, supaya program-program yang sudah direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik pemerintah daerah dan kantor wilayah Kementerian Agama bertanggung jawab menyusun perencanaan dan menyelenggarakan waktu pembelajaran agar berjalan efektif. Dengan begitu diharapkan proses pendidikan tetap berlangsung optimal sambil memberikan ruang bagi siswa untuk mendalami nilai-nilai spiritual dan sosial. "Ramadhan menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat iman, karakter, dan kebersamaan dalam lingkungan pendidikan," ujarnya. **(Ria)-d**

## Kenang Perjuangan, Subardi Nostalgia Eks Pengurus PSS Sleman

**YOGYA (KR)** - Anggota DPR RI Fraksi NasDem Subardi mengadakan temu kangen dengan eks punggawa PSS Sleman, eks wasit dan pengawas pertandingan PSSI Sleman. Pertemuan tersebut digelar di Joglo Sawah TanNuko, Sidoagung, Go-dean, Kabupaten Sleman.

Dalam momen itu, Subardi bernostalgia bersama teman-teman sepejuangannya. Turut hadir juga pendiri PSS Suryo Saryono. Subardi menceritakan kisah masa lalunya saat ditunjuk sebagai Bendahara PSS Sleman oleh Bupati Sleman Arifin Ilyas pada tahun 1996. Saat itu kondisi PSS sedang tidak baik-baik saja. Tidak memiliki sumber dana dari manapun, hingga ia rela menggunakan uang pribadi untuk membiayai kebutuhan tim. "Ya memang kondisinya begitu, ketika saya



KR-Istimewa

**Subardi saat bernostalgia bersama pengurus PSS Sleman.**

ditunjuk saya harus bisa membiayai. Kemudian saya mengubah sedikit organisasi, menejemennya, dan rekrutmen pemain," kata Subardi, Minggu, (23/2). Kondisi pahit tersebut tidak membuat Subardi patah semangat. Ia membuat terobosan dengan dua cara. Pertama, merekrut pemain muda lokal berbakat. Kedua, pembenahan sektor keuangan. Hasilnya, 4 tahun kemudian PSS lo-

los ke Divisi Utama Liga Indonesia.

"Nah kita lakukan perubahan. Pemain muda kita tampilkan, fokus pembinaan fisik, mental, strategi, bagaimana caranya kita punya pemain lokal berkualitas yang bisa membawa prestasi.

Dari tahun 1996 saya masuk, tahun 2000 PSS lolos ke divisi utama," lanjutnya.

Perjuangan itu sangat berkesan sekaligus bangga. Subardi bersama pe-

ngurus PSS bisa merealisasikan impian masyarakat Sleman pada waktu itu. Namun keberhasilan tersebut bukanlah faktor dirinya, melainkan atas kekompakan jajaran manajer dan jajaran klub lokal yang dinaungi PSS.

"Proses itu bukan saya semua, tidak. Saya tidak ada apa-apanya tanpa kekompakan dari seluruh pengurus. Saat itu semua unsur PSS solid. Kita berjuang bersama, itulah perjuangan," terang Ketua DPW NasDem DIY itu.

Bersama para sesepuh PSS, Subardi berharap PSS semakin berprestasi. Manajemennya semakin modern, selalu berada di kasta tertinggi sepakbola nasional dan menghasilkan pemain-pemain muda berkualitas. "Saya optimis PSS akan terus berkibar di kasta tertinggi sepakbola nasional," pungkasnya. **(\*)-d**

## GENJOT PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU

### Duta Demokrasi, Mitra Pemkot Dekati Kaum Muda

**YOGYA (KR)** - Pemkot Yogyakarta mengukuhkan Duta Demokrasi yang terdiri dari berbagai elemen kaum muda. Keberadaannya akan menjadi mitra strategis pemerintah guna mendekati para pemuda sekaligus menggenjot partisipasi pemilih dalam pemilu.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Yogyakarta Nindyo Dewanto, mengungkapkan sebenarnya ada beberapa program rutin yang sudah berjalan untuk menanamkan jiwa demokratis bagi masyarakat. Di antaranya sekolah demokrasi, parlemen pelajar dan lain sebagainya serta saat ini berupa Duta Demokrasi. "Duta Demokrasi ini berjumlah 50 orang. Sebagian besar merupakan lulusan dari sekolah demokrasi angkatan tahun 2023 dan 2024. Selain itu juga ada pemuda lintas agama maupun pengurus OSIS jenjang SMA sederajat," urainya di sela pengukuhan Duta Demokrasi di kompleks Balaikota Yogyakarta, Senin (24/2).

Menurut Nindyo, kaum muda sengaja banyak dilibatkan



KR-Ardhi Wahdan

**Yunianto Dwisutono mengukuhkan Duta Demokrasi.**

dalam Duta Demokrasi seiring potensinya yang sangat tinggi. Salah satunya anak muda yang menjadi pemilih pemula tercatat merupakan unsur paling banyak dalam daftar pemilih tetap (DPT). Tidak tanggung-tanggung, dalam DPT terakhir di Kota Yogyakarta para pemilih pemula mencapai sekitar 60 persen.

Di sisi lain, imbuh Nindyo, partisipasi pemilih di Kota Yogyakarta ternyata juga perlu digenjot. Dirinya membandingkan dalam Pemilu 2024 tingkat partisipasi di Kota Yogyakarta berhasil melampaui

dari rata-rata nasional yakni hingga 80 persen. Akan tetapi dalam Pilkada 2024 justru tingkat partisipasinya anjlok karena hanya pada kisaran 60 persen. "Makanya perlu ada berbagai cara agar partisipasi pemilih bisa lebih tinggi. Pemilu memang masih akan berlangsung lima tahun mendatang tetapi momentumnya saat ini masih hangat sehingga perlu kita siapkan secara lebih dini," imbuhnya.

Oleh karena itu, pada Duta Demokrasi yang kemarin dikukuhkan harapannya bisa memberikan edukasi serta

mengajak teman sebaya di lingkungan masing-masing agar melek terhadap politik. Setidaknya apa yang sudah didapat dalam kelas demokrasi bisa ditularkan ke komunitasnya.

Sementara Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta Yunianto Dwisutono, menilai dengan adanya Duta Demokrasi maka proses politik dan demokrasi di Kota Yogyakarta bisa semakin baik. Terutama dalam hal keterlibatan aktif pemuda berpartisipasi dalam prosesnya. "Duta Demokrasi ini menjadi langkah konkret bersama dalam membangun kesadaran politik sejak dini dan memastikan bahwa generasi muda memiliki pemahaman yang baik tentang demokrasi, guna menciptakan partisipasi politik yang lebih aktif dan berkualitas di masa mendatang. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentu sudah selayaknya pemuda Kota Yogyakarta peduli terhadap kehidupan demokrasi yang ada di NKRI," paparnya. **(Dhi)-d**

## BEKALI 121 ASN CALON PURNA TUGAS

### Wawan Berbagi Pengalaman Jalankan Usaha

**YOGYA (KR)** - Sedikitnya 121 aparat sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Yogyakarta yang akan menjalani masa pensiun mendapatkan pembekalan. Wakil Walikota Yogyakarta Wawan Harmawan pun berbagi pengalamannya dalam menjalankan usaha.

Dalam paparannya, Wawan menyampaikan masa pensiun harus dipersiapkan dengan baik mulai dari aspek psikologis, kesehatan fisik dan ekonomi. "Melalui pembekalan dan pelatihan calon purna tugas ini kata kuncinya adalah bisa menikmati apa yang akan dilakukan pada masa pensiun nanti," pesannya di sela pembekalan, Senin (24/2).

Pembekalan tersebut digelar selama dua hari hingga Selasa (25/2) hari ini. Materi pembekalan meliputi tata boga olahan rumah, sayuran hidroponik, peternakan kambing, perkebunan angrek tabula pot, serta pengenalan bisnis kios warung.

Wawan yang merupakan pengusaha kuliner ini pun mengungkapkan, bagi ASN purna tugas yang ingin memulai menjalankan usaha, ada aspek penting yang perlu diperhatikan yaitu kapasitas investasi modal dan melihat kebutuhan pasar. "Kalau kita bicara aspek ekonomi ataupun usaha ini harus ditata, jangan investasikan semua dana yang ada seba-

gai modal, tapi secara lebih terukur. Kemudian buat produk yang disesuaikan antara minat dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar," terangnya.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta Dedi Budiono, menjelaskan sebanyak 121 ASN calon purna tugas adalah mereka yang pensiun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Juni hingga 1 Oktober 2025.

"Pada kegiatan pembekalan nanti juga ada pelatihan keterampilan yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing," jelasnya.

Dedi menerangkan, selain memberikan pembekalan keterampilan, calon purna tugas juga akan diberikan pelatihan terkait persiapan secara mental maupun emosional untuk menjalani masa pensiun.

Di sisi lain salah satu ASN calon purna tugas, Retno Indaryanti mengatakan dirinya telah mengabdikan selama 38 tahun 6 bulan sebagai guru di TK Tompeyan. "Saat pensiun nanti harapannya saya bisa semakin banyak menikmati waktu bersama keluarga. Untuk pelatihannya saya pilih keterampilan hidroponik, supaya bisa diterapkan langsung di rumah," katanya. **(Dhi)-d**

## Pengurus PRPM dan PRNA Kadipaten Kulon Dilantik

**YOGYA (KR)** - Pengurus Pimpinan Ranting Pemuda Muhammadiyah (PRPM) dan pengurus Pimpinan Ranting Nasiatul Aisyiyah (PRNA) Kadipaten Kulon, Kemantren Kraton Yogyakarta periode 2024-2029 dilantik, baru-baru ini. Pengurus tersebut dilantik oleh Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah (PCPM) Kraton Guntur Aji Hidayatullah dan Pimpinan Cabang Nasiatul Aisyiyah (PCNA) Kraton Nurul.

Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kadipaten Kulon, Arif Rahmanto SH menuturkannya bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus menertibkan administrasi organisasi, baik itu dari pencatatan kesekretariatan maupun pencatatan keuangan. Selain itu akan meningkatkan keterlibatan PRPM dan PRNA dalam kerja-kerja organisasi PRM Kadipaten Kulon. "Kami bersyukur bahwa PRPM dan PRNA Kadipaten Kulon cukup aktif sebagai pelaksana teknis

kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyiyah," ujarnya.

Ketua PRPM Kadipaten Kulon, Gustav Ibnu Hakam mengatakan keterlibatan generasi muda di kegiatan Muhammadiyah Ranting Kadipaten Kulon adalah langkah konkret dalam melakukan kaderisasi. Sedangkan Ketua PRNA Kadipaten Kulon, Abel mengatakan peran generasi yang lebih tua tetap dibutuhkan dalam mengawasi dan mengarahkan aktivitas para pemuda dan pemudi.

Dengan pelantikan ini diharapkan semakin menambah kekuatan gerakan dakwah Islam, amar makruf dan nahi munkar, khususnya di wilayah Kadipaten Kulon. Turut hadir dalam acara pelantikan antara lain, Ketua Pimpinan Ranting Aisyiyah (PRA) Kadipaten Kulon Hj Latifah Hanum, anggota Muhammadiyah dan Aisyiyah, takmir masjid, musala dan langgar di Kadipaten Kulon. **(Dev)-d**

## AGUS TRIANTO, FRAKSI PPP

### Konsisten Tuntaskan Raperda Minuman Beralkohol



KOTA YOGYAKARTA

konsisten dalam menuntaskan raperda tersebut.

Menurutnya, dalam pandangan umum pihaknya menyampaikan sebagai partai yang berasaskan Islam pada prinsipnya menolak segala bentuk peredaran dan konsumsi minuman beralkohol karena tidak sesuai dengan norma budaya, norma sosial, maupun norma agama. "Tapi kami pun memahami bahwa raperda tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol serta pelarangan Minuman Oplosan di Kota Yogyakarta bertujuan untuk membatasi peredaran minuman beralkohol dan mencegah dampak buruk yang ditimbulkan, terutama maraknya minuman oplosan yang telah banyak menelan korban," urainya, Senin (24/2).

Oleh karena itu raperda yang sudah dua tahun tak kunjung diselesaikan tersebut harus bisa dituntaskan tahun ini juga. Apalagi seluruh fraksi telah memiliki pemahaman bersama dalam mengendalikan peredaran miras maupun minuman oplosan. Terlebih dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang melibatkan berbagai un-

sur organisasi kemasyarakatan juga menyampaikan dukungannya terhadap peredaran miras di Kota Yogyakarta.

Beberapa ketentuan yang kini tengah dibahas antara lain menyangkut proses perizinan hingga kawasan pengendalian. Sebagai kota wisata, minuman beralkohol peredarannya harus disesuaikan dengan ketentuan. Seperti hanya diperjualbelikan oleh hotel berbintang maupun bar serta kawasan tertentu. "Khusus untuk hotel diusulkan agar hotel bintang tiga hanya boleh menyediakan minuman beralkohol golongan A atau sejenis bir. Ini karena jumlah hotel bintang tiga di Kota Yogyakarta jumlahnya cukup banyak. Sedangkan bintang empat dan lima boleh menyediakan golongan B atau C. Itu pun untuk menyediakan tamu," tandasnya.

Agus juga menekankan perlu ada jarak keberadaan bar yang menjual minuman beralkohol dengan kantor pemerintahan. Termasuk kawasan-kawasan tertentu yang diatur dalam regulasi lebih teknis guna memudahkan pengawasan dan pengendalian. Hal ini agar ada batasan yang jelas dan tegas sehingga tidak semua orang bisa mengakses. Apalagi penjualan minuman beralkohol secara online atau e-commerce sudah jelas tidak diperbolehkan. "Intinya regulasi ini nantinya merupakan bentuk pengendalian dan pengawasan. Semoga menjadikan Yogyakarta sebagai kota layak huni serta layak investasi, dan betul-betul Yogyakarta yang berhatu nyaman," ungkapnya.

Dengan demikian ketika regulasi sudah ditetapkan maka tim eksekutif yang memiliki kewenangan dalam pengawasan harus mampu bekerja secara profesional. "Selaras dengan program makan bergizi gratis (MBG), di mana pemerintah pusat dengan biaya begitu besar menginginkan generasi emas. Tetapi kalau minuman beralkoholnya tidak benar-benar dalam pengawasan dan pengendalian, kan jadinya percuma juga," pungkasnya. **(Dhi)-d**

## PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 259 /BALMON.34/PL.04.05/02/2025

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, akan melelang Barang Milik Negara berupa 1 (unit) Mobil Unit Monitoring, dengan penawaran secara tertulis (*open bidding*) tanpa kehadiran peserta lelang yang dapat dilihat pada alamat domain [portal.lelang.go.id](http://portal.lelang.go.id) dan/atau [lelang.go.id](http://lelang.go.id)

NO	NAMA BARANG	NO POLISI	BPKB & STNK	TAHUN	LIMIT	JAMINAN
1	Land Rover 110 Defender	AB 1506 IH	ada	2013	Rp.349.603.000	Rp.35.000.000

LELANG AKAN DILAKSANAKAN PADA :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 7 Maret 2025  
Batas Akhir Penawaran : 14.00 WIB (Waktu Server)  
Alamat Domain : [portal.lelang.go.id](http://portal.lelang.go.id) dan/atau [lelang.go.id](http://lelang.go.id)  
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta Jl. Kusumanegara No. 11 Yogyakarta



Enik Sarjumanah